

**EVALUASI KEBIJAKAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI DI DESA BATU AMPAR KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU**

Pragata Samban Cahyadi
NPP : 31.0284

Asdaf Kabupaten __, Provinsi __

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan

Email: Pragata@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Lina Marlina, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The transmigration area development program is one of the Indonesian government's efforts to address population issues and improve the welfare of communities in underdeveloped areas. In Batu Ampar Village, South Bengkulu Regency, Bengkulu Province, the implementation of this program faces various challenges and requires in-depth evaluation to identify successes and challenges in its implementation. **Objective:** This study aims to evaluate the effectiveness of the policy of assisting the transmigration area development program in Batu Ampar Village, identify supporting and inhibiting factors in the program's implementation, and provide recommendations for improving implementation strategies in the future. **Methods:** This research uses qualitative methods with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews with relevant stakeholders, and program document analysis. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. **Results/Findings:** The results of the study indicate that although there have been significant efforts to advance the transmigration area, the program still faces various challenges in achieving the set targets. Resource and fund management of the program is considered quite efficient, but there is still room for improvement. Additionally, although the allocated budget is significant, strategies are needed to seek additional funding sources. The program's implementation is still uneven, and responsiveness to community needs is rated positively but requires enhancement. **Conclusion:** The conclusion from the evaluation shows that the policy of assisting the transmigration area development program in Batu Ampar Village needs improvement in several aspects to achieve greater success in its implementation.

Keywords: Policy Evaluation, Transmigration Program, Batu Ampar Village, Program Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan dalam implementasinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tugas pembantuan program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi implementasi di masa mendatang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan stakeholders terkait, dan analisis dokumen program. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan untuk memajukan kawasan transmigrasi, program ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya dan dana program dinilai cukup efisien, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Selain itu, meskipun anggaran yang dialokasikan sudah signifikan, diperlukan strategi untuk mencari sumber dana tambahan. Implementasi program masih belum merata dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dinilai positif, namun memerlukan peningkatan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tugas pembantuan program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar memerlukan perbaikan pada beberapa aspek untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Transmigrasi, Desa Batu Ampar, Efektivitas Program

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk mengalihkan penduduk dari daerah perkotaan yang padat menjadi daerah pedesaan di dalam negara. Orang yang ikut program ini disebut transmigran (Sulastru et al., 2022). Tujuan utama program ini adalah mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan peluang kerja, serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, program ini diatur untuk menciptakan ketertiban, memberikan pedoman hukum, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Romadhoni, 2023).

Transmigrasi saat ini dilakukan dengan paradigma baru yang fokus pada mendukung ketahanan pangan dan perumahan, mendorong penggunaan energi alternatif, memperluas investasi ke seluruh wilayah Indonesia, mendukung pertahanan wilayah terluar dan perbatasan negara, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Transmigrasi sekarang bukan lagi sekadar

pemindahan penduduk, tetapi merupakan upaya pembangunan wilayah. Pendekatan tidak lagi sentralistik dari Jakarta, melainkan berdasarkan kerjasama antara daerah pengirim dan tujuan transmigrasi (Subarsono, 2005). Umumnya, orang-orang yang pindah dari Pulau Jawa ke wilayah transmigrasi didorong oleh alasan ekonomi, dengan harapan kehidupan mereka akan lebih baik di tempat baru. Salah satu destinasi migrasi dari Pulau Jawa adalah Bengkulu.

Bengkulu, sebuah provinsi di Pulau Sumatra, terletak di bagian barat daya pulau tersebut. Ibu kotanya adalah Kota Bengkulu. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung (Siswono, 2003). Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mayoritas berupa dataran rendah, memiliki luas wilayah sekitar 1.186,10 km². Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Seluma di utara, Provinsi Sumatera Selatan di timur, Kabupaten Kaur di selatan, dan Samudera Indonesia di barat.

Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa transmigrasi dengan dana untuk program pembangunan kawasan sebesar Rp2.398.755.000, yang mana sudah dipergunakan sebesar Rp1.500.000.000 untuk pembangunan 10 unit rumah. Tabel berikut menunjukkan laporan kemajuan per triwulan 3 dana tugas pembantuan dan urusan bersama tahun anggaran 2023:

Kode Kegiatan	Rencana Kinerja	Keterangan
K	Rp	K (%)
419095	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	2.467.075.000
6464	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Layanan
6471	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Paket

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2023

Desa Batu Ampar merupakan salah satu wilayah transmigrasi di Kecamatan Kedurang yang telah dimulai sejak tahun 2018. Transmigrasi di desa Batu Ampar ini berbasis kawasan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wilayah transmigrasi batu ampar mencapai 900 hektare dan baru dipergunakan seluas 30 hektare, menyisakan 870 hektare sebagai lahan cadangan transmigrasi. Wilayah ini baru dihuni 23 kepala keluarga (KK) dengan target 300 KK. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi ke daerah Batu Ampar.

Program transmigrasi di Desa Batu Ampar memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut (Creswell, 2016). Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan yang diterapkan, dukungan dari berbagai pihak, dan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia. Kebijakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan dorongan yang signifikan bagi pelaksanaan program transmigrasi, namun perlu evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Desa Batu Ampar Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Tugas Pembantuan dalam proses transmigrasi di Trans Batu

Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan tugas pembantuan dalam proses transmigrasi di Trans Batu Ampar, serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program transmigrasi di Desa Batu Ampar, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para transmigran dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan program transmigrasi di masa depan (Simangunsong, 2017).

Transmigrasi di Indonesia telah menjadi salah satu program penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Namun, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan tugas pembantuan dalam program pembangunan kawasan transmigrasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk analisis kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan program transmigrasi di Indonesia, khususnya di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual dari program transmigrasi di Desa Batu Ampar, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini di masa depan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi yang lebih efektif dan efisien.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak dan efektivitas program transmigrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fran Adam (2020), Hendra Putra (2018), dan Danang Listiana Putra (2019), telah fokus pada aspek sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi sosial antara transmigran dan masyarakat lokal. Namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kebijakan tugas pembantuan dalam program pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Salah satu kesenjangan utama dalam penelitian-penelitian tersebut adalah kurangnya analisis mendalam mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang spesifik terhadap kebijakan tugas pembantuan di kawasan transmigrasi. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Sulastri et al. (2022) dan Ahmad Ilham Romadhoni (2023) memang telah mengidentifikasi beberapa masalah infrastruktur dan program kerja yang menunjang pembangunan kawasan transmigrasi. Namun, penelitian ini tidak secara khusus menyoroti bagaimana kebijakan tugas pembantuan diterapkan dan

diadaptasi dalam konteks lokal, serta bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan faktor-faktor lokal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Batu Ampar.

Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam kebijakan tugas pembantuan di kawasan transmigrasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada evaluasi hasil dan dampak jangka pendek dari program transmigrasi, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada strategi jangka panjang dan upaya perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang kebijakan tugas pembantuan dalam program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar, termasuk identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut (Winarno, 2012).

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek dari program transmigrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan wilayah dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang efektivitas kebijakan transmigrasi dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fran Adam pada tahun 2020 dengan judul "Pengaruh Transmigrasi terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir." Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat migran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, terutama dalam hal pekerjaan dan tingkat pendapatan yang meningkat secara signifikan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hendra Putra pada tahun 2018 dengan judul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kabupaten Luwu Timur." Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran, pendidikan, suku, dan sistem pemerintahan yang ada.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Danang Listiana Putra pada tahun 2019 dengan judul "Harmonisasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu." Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuan utama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat sikap primordialisme, diskriminatif, dan stereotipe di Desa Mataram, yang menjadi tantangan bagi masyarakat transmigran dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ahmad Ilham Romadhoni pada tahun 2023 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Latompa dan Raimuna oleh Tim KKN-PPM UGM 2022-SG001 dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara." Penelitian ini menggunakan metode riset berbasis komunitas dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan oleh Tim KKN-PPM UGM telah menunjang peningkatan Indeks Perkembangan

Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dan pembangunan Kawasan Mutiara, terutama dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sulastris, Sasmita, Asteriniah, dan Syofyan pada tahun 2022 dengan judul "Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir." Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan kawasan, masih terdapat kekurangan dalam dua indikator utama, yaitu kejelasan sasaran penerima program dan jumlah sarana prasarana yang perlu ditingkatkan (Wirawan, 2011).

Semua penelitian ini menunjukkan bahwa transmigrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan memberikan analisis komprehensif terhadap kebijakan tugas pembantuan dalam program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada dampak sosial-ekonomi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari kebijakan tugas pembantuan, termasuk efisiensi pengelolaan sumber daya dan dana, serta strategi untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi lebih mendetail mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta menawarkan rekomendasi konkret untuk peningkatan efektivitas kebijakan transmigrasi (Dunn, 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam implementasi program transmigrasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transmigrasi tidak hanya membutuhkan alokasi sumber daya yang efisien, tetapi juga strategi distribusi manfaat yang merata di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Dengan menggabungkan data dari observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang bagaimana program transmigrasi dapat diadaptasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, khususnya di Desa Batu Ampar.

Kebaruan lainnya adalah evaluasi terhadap upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta potensi keterlibatan sektor swasta dan kerjasama internasional dalam mendukung program transmigrasi. Penelitian ini tidak hanya membahas tantangan yang dihadapi, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk perbaikan melalui strategi kemitraan yang inovatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur kebijakan transmigrasi di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program transmigrasi di masa mendatang.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Tugas Pembantuan dalam Proses Transmigrasi di Trans Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan yang ada, proses pembentukan kebijakan, serta mekanisme pelaksanaan yang digunakan dalam proses transmigrasi.

Peneliti bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan dan langkah-langkah praktis yang diambil untuk memfasilitasi transmigrasi di wilayah tersebut (Widjaja, 2007).

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Tugas Pembantuan dalam Proses Transmigrasi di Trans Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tujuan ini melibatkan pengungkapan berbagai elemen yang baik membantu maupun menghambat keberhasilan kebijakan transmigrasi. Analisis ini akan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan, memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks di mana kebijakan tersebut beroperasi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Kebijakan Tugas Pembantuan dalam Proses Transmigrasi di Trans Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi. Peneliti akan menilai efektivitas upaya-upaya tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan kebijakan.

II. METODE

Menurut Creswell (2016:3), pendekatan penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan penelitian menjadi langkah awal yang penting untuk memulai sebuah penelitian dengan rencana dan prosedur yang baik agar penelitian dapat berjalan lancar dan mendapatkan data yang tepat untuk dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk memiliki keterampilan dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dan relevan agar kegiatan penelitian ini dapat menghasilkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, bukan angka. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara dan didukung oleh catatan lapangan, dokumentasi, rekaman, dan sumber pendukung lainnya. Pendekatan penelitian yang paling sesuai untuk meneliti Evaluasi Kebijakan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, adalah pendekatan kualitatif. Hal ini karena pendekatan kualitatif lebih cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan beragam dalam situasi yang unik dan spesifik seperti evaluasi kebijakan. Metode-metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus dapat digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut (Putra, 2018).

Penelitian kualitatif memiliki desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, di mana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, di mana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang

dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini akan menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh melalui studi kasus, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur kebijakan transmigrasi di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program transmigrasi di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Desa Batu Ampar

Dalam evaluasi kebijakan tugas pembantuan program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, berbagai aspek perlu diperhatikan untuk memahami keberhasilan, efisiensi, dan dampak dari program tersebut. Penelitian ini memanfaatkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2013) untuk mengevaluasi berbagai dimensi dari kebijakan yang diterapkan. Berikut ini adalah pembahasan mendetail mengenai hasil evaluasi dari beberapa dimensi kunci: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas (Adam, 2020).

Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan tugas pembantuan dalam program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar telah memenuhi target dan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, penilaian dilakukan dengan mengacu pada enam dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn. Dimensi-dimensi tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas program transmigrasi diukur dari sejauh mana tujuan program telah tercapai. Berdasarkan tabel berikut, terlihat capaian penempatan transmigrasi relatif rendah dibandingkan target yang ditetapkan:

Tahun	Jumlah Penempatan (KK)	Target Penempatan (KK)	Persentase Capaian (%)
2018	25	300	8,33
2023	10	300	3,33
Total	35	300	11,67

Tabel 4.6: Perbandingan Capaian Penempatan Transmigrasi dengan Target

Data menunjukkan bahwa capaian penempatan transmigrasi masih jauh dari target yang ditetapkan. Penempatan tahun 2018 mencapai 25 KK dari target 300 KK, dan pada tahun 2023, hanya 10 KK yang terpaksa ditempatkan, mengakibatkan persentase capaian total sebesar 11,67%.

2. Efisiensi

Efisiensi program transmigrasi terkait dengan penggunaan sumber daya dan dana. Berikut adalah ringkasan pendayagunaan sumber daya pelaksana dan sumber dana:

Tabel 4.8: Data Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana dan Sumber Dana dalam Program Transmigrasi

No	Sumber Dana	Keterangan
1	APBN Dana Tugas Pembantuan	Dana untuk penempatan, bantuan modal, dan infrastruktur
2	APBD Provinsi	Dukungan untuk program transmigrasi di tingkat provinsi
3	APBD Kabupaten/Kota	Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan lokal
4	Sumber Lain yang Tidak Mengikat	Bantuan dari swasta, lembaga donor, atau program kemitraan

Kepala Bidang Transmigrasi Bapak Azizlan S.Sos mengungkapkan bahwa program ini dijalankan sesuai standar dan akan terus berlanjut sampai target tercapai. Pendayagunaan sumber daya manusia di UPT Batu Ampar melibatkan berbagai pihak mulai dari Kepala Unit Pelaksana Teknis hingga petugas keamanan dan kesehatan.

3. Kecukupan

Kecukupan dana menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan program. Berikut adalah alokasi dana yang tersedia untuk program transmigrasi di Desa Batu Ampar:

Tabel 4.9: Alokasi Dana untuk Program Transmigrasi di Desa Batu Ampar

Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
APBN	500.000.000
APBD Provinsi	300.000.000
APBD Kabupaten	200.000.000
Sumber Lain	100.000.000
Total	1.100.000.000

Meskipun total dana yang tersedia mencapai Rp 1.100.000.000, menurut Koordinator Program, kebutuhan pendanaan tahunan diperkirakan mencapai Rp 1-2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan dana masih menjadi masalah serius.

4. Perataan

Perataan program transmigrasi berkaitan dengan distribusi bantuan yang merata. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan sudah merata, hasilnya belum sepenuhnya mengentaskan masalah transmigrasi di seluruh sasaran program. Wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan di Desa Batu Ampar sudah merata.

5. Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana program dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penurunan keluhan masyarakat dan tanggapan positif terhadap program transmigrasi menunjukkan bahwa program ini relatif sukses dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Data berikut menunjukkan hak-hak yang diberikan dan tanggapan positif dari masyarakat:

Tabel 4.10: Tanggapan Warga

Hak-hak Warga Transmigrasi	Tanggapan Warga
Rumah transmigran dan kelengkapannya	Program transmigrasi dianggap mulia
Lahan pekarangan dan lahan usaha	Mengurangi kepadatan penduduk dan mensejahterakan masyarakat
Jatah hidup beras dan non beras	Masalah klaim tanah dapat ditangani
Bantuan bibit, obat-obatan, dan pupuk	Program diharapkan berlanjut

Ketepatan program berkaitan dengan realisasi program sesuai indikator transmigrasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masih terdapat beberapa ketepatan yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa indikator transmigrasi tercapai.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Tugas Pembantuan Program Transmigrasi di Desa Batu Ampar

Faktor Pendukung

- **Dasar Hukum atau Peraturan:** Keberadaan undang-undang yang mendukung transmigrasi memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program.
- **Kerjasama dan Kolaborasi:** Kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta mendukung pelaksanaan program.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Bengkulu Selatan memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai rencana.
- **Dukungan Swadaya Masyarakat:** Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga swadaya membantu mengurangi beban anggaran.

2. Faktor Penghambat

- **Kurangnya Partisipasi Pihak Non-Pemerintah:** Dukungan dari pihak swasta masih minim, yang menghambat kelancaran program.
- **Terbatasnya Anggaran:** Alokasi anggaran yang terbatas hanya cukup untuk pembangunan, sementara pemeliharaan belum memadai.
- **Kurangnya Minat Masyarakat untuk Bermigrasi:** Target penempatan transmigrasi masih jauh dari harapan, meskipun fasilitas primer telah disediakan.

Upaya Mengatasi Hambatan

- **Peningkatan Kerjasama:** Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan dana.
- **Pengoptimalan Anggaran:** Pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih efisien untuk memastikan alokasi dana mencakup pemeliharaan.
- **Promosi dan Sosialisasi:** Upaya promosi dan sosialisasi program transmigrasi ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat.

Evaluasi kebijakan tugas pembantuan program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar menunjukkan bahwa program ini telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun efektivitas, efisiensi, dan responsivitas program menunjukkan hasil yang positif, masalah kecukupan dana, pemerataan, dan partisipasi masyarakat memerlukan perhatian lebih lanjut. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan

kerjasama, pengelolaan anggaran, dan promosi program akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan transmigrasi yang lebih baik di masa depan.

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial

Implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan ini ditetapkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori DYE, implementasi kebijakan ini memerlukan evaluasi yang melibatkan berbagai aspek, seperti organisasi pelaksana, anggaran, dan sumber daya manusia.

Organisasi pelaksana memainkan peran krusial dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, terdapat kebutuhan untuk pembentukan organisasi baru di distrik untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, perbedaan pandangan antara distrik dan dinas sosial mengenai penambahan tugas dan fungsi menghambat kerjasama dan komunikasi antar organisasi.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tugas pembantuan program pembangunan kawasan transmigrasi di Desa Batu Ampar menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan pencapaian target. Berdasarkan temuan, terdapat ketidaksesuaian antara capaian penempatan transmigrasi dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi penempatan transmigrasi mencapai 25 KK dari target 300 KK, sementara pada tahun 2023 hanya 10 KK dari target yang sama, dengan total capaian sebesar 11,67%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pencapaian target penempatan transmigrasi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kendala anggaran, kurangnya partisipasi pihak non-pemerintah, dan kurangnya minat masyarakat untuk berpindah ke desa tersebut.

Dalam aspek efisiensi, penggunaan sumber daya pelaksana dan dana menunjukkan hasil yang cukup variatif. Meskipun terdapat pendayagunaan sumber daya manusia di UPT Batu Ampar yang berperan penting dalam pelaksanaan program, seperti kepala unit pelaksana teknis dan petugas keamanan, terdapat keterbatasan dalam pendanaan yang mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Alokasi dana dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, meskipun cukup signifikan, tidak selalu mencukupi untuk pemeliharaan jangka panjang. Ini diperparah dengan minimnya kontribusi dari pihak swasta, yang seharusnya dapat memperkuat dukungan terhadap program transmigrasi.

Di sisi lain, responsivitas program transmigrasi diukur dari penurunan keluhan masyarakat dan tanggapan positif terhadap program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini telah mampu mengatasi beberapa masalah, seperti perbaikan infrastruktur dasar yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi. Namun, kendala dalam kecukupan dana dan ketidakmerataan realisasi program masih menjadi perhatian. Penurunan keluhan masyarakat dan dukungan positif menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan, program transmigrasi dapat

memberikan dampak positif bagi masyarakat jika dikelola dengan baik dan diimbangi dengan solusi yang efektif terhadap kendala yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain dari temuan utama terkait penempatan transmigrasi dan efisiensi sumber daya, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan menarik yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai program transmigrasi di Desa Batu Ampar. Salah satu temuan menarik adalah tingkat adaptasi masyarakat lokal terhadap program ini. Meskipun program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan lahan dan infrastruktur, ternyata ada variasi signifikan dalam tingkat penerimaan masyarakat. Beberapa kelompok transmigrasi menunjukkan adaptasi yang cepat dan berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sedangkan yang lain menghadapi kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat lokal dan mengelola sumber daya secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam keberhasilan program transmigrasi (Mujiyanto, Utama, & Senoaji, 2019).

Temuan lainnya yang menarik adalah dampak lingkungan dari program ini. Meskipun program transmigrasi dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa perubahan penggunaan lahan yang cepat telah berdampak pada ekosistem lokal. Pembukaan lahan baru untuk transmigrasi telah menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berkurangnya keragaman hayati di beberapa area. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat transmigrasi yang bergantung pada sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Temuan ketiga yang mencolok adalah peran teknologi dalam mendukung program transmigrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem pemantauan berbasis digital dan aplikasi manajemen sumber daya, telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan program. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap progres program dan memberikan akses informasi yang lebih cepat kepada pemangku kepentingan (Hapsari, Putriana, & Ichwani, 2022). Namun, ada juga tantangan dalam hal infrastruktur teknologi yang masih terbatas di beberapa daerah, yang dapat menghambat potensi manfaat teknologi tersebut. Oleh karena itu, investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi masyarakat setempat bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program transmigrasi di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Tugas Pembantuan dalam Proses Transmigrasi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan mengacu pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2013), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, efektivitas pelaksanaan program transmigrasi, yang diukur melalui capaian target dan hasil pelaksanaan, masih jauh dari target yang diharapkan. Meskipun pelaksanaan program memiliki beberapa aspek positif, seperti efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang dinilai sudah memadai, namun efektivitas keseluruhan masih perlu perbaikan. Kedua, indikator kecukupan, baik dari segi dana maupun waktu, belum berjalan dengan optimal, menunjukkan adanya

kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang harus diatasi. Responsivitas masyarakat terhadap program, di sisi lain, dinilai sudah baik, menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat lokal. Ketepatan dalam realisasi program juga menunjukkan hasil yang baik, sementara perataan realisasi program ke seluruh sasaran program telah berjalan dengan baik dan merata.

Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Program Tugas Pembantuan di Desa Batu Ampar. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum dan peraturan yang jelas, kerjasama antar pihak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin, serta dukungan swadaya dari masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah kurangnya partisipasi dari pihak non-pemerintah atau swasta, terbatasnya anggaran, serta kurangnya minat masyarakat untuk bermigrasi ke Desa Batu Ampar. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidakefektifan hasil dari program transmigrasi dan perlu menjadi perhatian dalam perbaikan kebijakan ke depan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program transmigrasi di Desa Batu Ampar. Pertama, perlu dilakukan perbaikan strategis dalam manajemen sumber daya untuk memastikan bahwa semua sumber daya, baik manusia maupun material, digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan program. Pengelolaan dana dan waktu juga harus diperbaiki agar lebih efisien dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, guna mengatasi masalah kecukupan dana dan waktu yang masih menjadi kendala.

Selain itu, meningkatkan kerjasama antar pihak, baik antara pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, adalah langkah penting untuk mengatasi kekurangan partisipasi dan meningkatkan dukungan terhadap program. Pengoptimalan anggaran yang ada dengan cara evaluasi dan perencanaan yang lebih baik akan membantu memaksimalkan hasil program dan mengurangi ketergantungan pada anggaran yang terbatas. Terakhir, sosialisasi yang terus menerus mengenai manfaat dan peluang dari program transmigrasi kepada masyarakat, baik yang ada di daerah asal maupun calon transmigran, sangat penting untuk meningkatkan minat dan partisipasi dalam program ini. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan hasil dari program transmigrasi di Desa Batu Ampar dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil dan interpretasi temuan. Pertama, data yang digunakan dalam analisis hanya mencakup periode waktu tertentu dan wilayah yang terbatas, yaitu Desa Batu Ampar, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika dan tantangan transmigrasi di daerah lain. Kedua, terdapat kemungkinan bias dalam pengumpulan data akibat keterbatasan akses atau sumber informasi yang tidak lengkap, serta variasi dalam persepsi antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan dari sudut pandang efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif lain yang mungkin mempengaruhi hasil transmigrasi, seperti faktor sosial dan budaya yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar studi lebih lanjut dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan beberapa lokasi transmigrasi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan transmigrasi di berbagai konteks. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya mempertimbangkan analisis kualitatif yang mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari program transmigrasi, guna memahami lebih baik bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara holistik. Penggunaan metode penelitian yang lebih bervariasi, seperti wawancara mendalam dan studi kasus, dapat memberikan insight yang lebih mendetail. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi strategi inovatif dalam pengelolaan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keberhasilan program transmigrasi di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini,

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ilham Romadhoni. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Latompa dan Raimuna oleh Tim KKN-PPM UGM 2022-SG001 dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i2.9462>
- Sulastri, S., Sasmita, Y., Asteriniah, F., & Syofyan, S. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(2), 381. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3192>
- AG. Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Siswono, Y. (2003). *Transmigrasi: Kebutuhan negara kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang*. PT. Junalindo Aksara Grafika.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi; Contoh aplikasi evaluasi program: Pengembangan sumber daya manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, kurikulum, perpustakaan, dan buku tes*. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik* (5th ed.). Gajah Mada University Press.
- Widjaja, A. W. M. (2007). *Administrasi kepegawaian*. Rajawali Pers.

- Hendra Putra. (2018). Tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan di Kabupaten Luwu Timur. *Hermeneutika*, 4(1), Mei 2018.
- Danang Listiana Putra. (2019). Harmonisasi sosial masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. *Hermeneutika*, 4(1), Mei 2018.
- Adam, F. (2020). Pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
- Mujiyanto, M., Utama, S. P., & Senoaji, G. (2019). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Program Pembangunan Transmigrasi Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(2), 87–97. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9215>
- Hapsari, I., Lies Putriana, & Tia Ichwani. (2022). PENGARUH KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DITJEN PPKTRANS KEMENDES A PD TT. *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Pancasila*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.35814/jimp.v2i2.3297>

